



BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Landasan Teoritis

1. Prudence

Sejak tahun 1994, sebagian PSAK sudah mengacu pada IAS atau sekarang dikenal sebagai IFRS, tetapi masih ada beberapa bagian yang mengacu pada US GAAP. Pada tahun 2006, Indonesia yang tergabung dalam *The Group of Twenty* (G20) melakukan konvergensi IFRS ke dalam standar akuntansi yang sudah berlaku sebelumnya. Tujuan digunakannya IFRS adalah untuk agar laporan keuangan di seluruh negara mengacu pada suatu standar utama yang sama dan dapat diterima secara umum oleh negara-negara lain. Tujuan tersebut juga menjadi alasan bagi Indonesia untuk mengadopsi IFRS. Dengan diadopsinya IFRS, diharapkan tidak hanya laporan keuangannya yang dapat diterima secara umum, namun perusahaan-perusahaan di Indonesia juga tidak akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan investor asing (Ramawati, 2015).

Seiring dengan adanya konvergensi IFRS, konsep konservatisme yang kini digantikan oleh prinsip *prudence* tidak sepenuhnya ditinggalkan. Beberapa standar dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) masih menggunakan konsep konservatisme seperti PSAK No. 14 tentang Persediaan yang menjelaskan bahwa persediaan dalam neraca disajikan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi bersih, dan PSAK No. 48 tentang Penurunan Nilai Aset yang menjelaskan bahwa penurunan nilai aset merupakan rugi yang harus segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif (Ardina dan Januarti, 2012).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Definisi *Prudence*

Dalam PSAK, prinsip *prudence* termasuk dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, dimana *prudence* digunakan untuk menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul.

Prinsip *prudence* mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta liabilitas atau beban tidak terlalu rendah. Namun, prinsip *prudence* tidak memperbolehkan membentuk cadangan tersembunyi atau penyisihan yang berlebihan dan dengan sengaja menetapkan aset atau penghasilan terlalu rendah atau pencatatan liabilitas dan beban yang lebih tinggi. Prinsip *prudence* menggunakan *current value* sebagai indikator pengukuran laporan keuangan yang dapat dimengerti, relevan, dapat diandalkan dan sebanding. Prinsip *prudence* hampir sama dengan prinsip konservatisme. Hanya saja *prudence* lebih menekankan pada kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang dibutuhkan untuk membuat perkiraan yang akan sangat diperlukan ketika berada pada kondisi yang tidak pasti, sehingga aset atau pendapatan tidak akan dilebih-lebihkan serta kewajiban atau pengeluaran tidak berlebihan (Hellman dalam Hikmah, 2013).

Prinsip *prudence* memperbolehkan pengakuan kenaikan aset atau menurunnya kewajiban dan beban dalam suatu kondisi tertentu meskipun belum terealisasi. Namun pengakuan tersebut harus disesuaikan dengan kriteria pengakuan suatu akun yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Pengakuan terhadap akun-akun yang bersangkutan harus relevan dan dapat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Informasi yang terkandung di dalam akun tersebut dapat menghasilkan perbedaan keputusan yang diambil oleh pemakai laporan keuangan, informasi tersebut juga harus sesuai dengan keadaan yang direpresentasikan, dapat diuji kebenarannya dan bersifat netral.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Pandangan Prinsip *Prudence*

Meski konsep konservatisme telah berganti menjadi prinsip *prudence*, namun hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan para peneliti. Peneliti menganggap prinsip *prudence* sebagai prinsip yang kontroversial karena adanya peneliti yang menentang, namun ada juga yang mendukung penerapan prinsip ini.

Berikut diuraikan pandangan yang bertentangan mengenai prinsip *prudence*:

(1) Prinsip *prudence* bermanfaat

Peneliti yang mendukung penerapan prinsip *prudence* mengatakan bahwa prinsip ini memberikan manfaat untuk perusahaan, salah satunya untuk menghindari oportunistik manajer terkait dengan kontrak-kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak (Astarini, 2011).

Ketika kepemilikan manajer rendah maka manajer cenderung untuk melakukan tindakan oportunistik. Tindakan oportunistik adalah tindakan yang dilakukan pihak tertentu untuk memaksimalkan kepentingannya. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, manajer akan melakukan manajemen laba agar laba yang dilaporkan menjadi besar. Dengan begitu kinerja manajer akan dinilai lebih baik oleh pemegang saham dan manajer akan mendapatkan imbalan yang besar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan adanya penerapan prinsip *prudence*, manajer tidak dapat melakukan tindakan oportunistik dengan membesarkan nilai laba, karena perusahaan tidak dapat langsung mengakui pendapatan namun dapat langsung mengakui beban (Ramawati, 2015).

(2) Prinsip *prudence* tidak bermanfaat.

Mayangsari dan Wilopo (2002) berpendapat bahwa prinsip *prudence* sebagai kendala yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Laba yang dihasilkan dari prinsip *prudence* merupakan laba yang tidak berkualitas, tidak relevan dan tidak bermanfaat. Prinsip *prudence* cenderung bias dan tidak mencerminkan realita sebenarnya.

Para penentang prinsip *prudence* menyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan prinsip konservatisme tidak dapat digunakan oleh pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi risiko perusahaan.

2. Pelaporan Keuangan

a. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan kepada semua pihak yang berkepentingan yang memerlukan informasi mengenai suatu perusahaan. Dengan kata lain, laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan suatu perusahaan beserta kegiatannya kepada pihak yang berkepentingan.

Beberapa definisi laporan keuangan dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

- (1) Menurut Kieso dan Weygandt (2011:21) Laporan Keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi laporan keuangan terhadap pihak-pihak



diluar korporasi. Laporan keuangan (financial statement) yang sering disajikan adalah (1) neraca, (2) laporan laba-rugi, (2) laporan arus kas, (4) laporan ekuitas atau pemegang saham.

(2) Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) laporan keuangan adalah suatu penyajian akhir dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. (PSAK 1).

Dari definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan mencerminkan seluruh transaksi usaha sepanjang periode yang disiapkan untuk pihak internal dan eksternal sebagai alat komunikasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, serta arus kas.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan.



c. Jenis Laporan Keuangan

Jenis-jenis laporan keuangan yang biasa digunakan suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

(1) Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan/entitas pada tanggal tertentu. Keadaan keuangan perusahaan tersebut dituangkan dalam aktiva, kewajiban dan ekuitas.

Neraca dapat disajikan dengan dua cara, yaitu bentuk *Scontro* atau sebelah-menyebelah dimana bagian kiri (debit) untuk aktiva, sedangkan bagian kanan (kredit) untuk kewajiban dan ekuitas. Cara kedua yaitu bentuk *Stafel* dimana neraca disusun dari atas ke bawah, dengan urutan aktiva, kewajiban dan ekuitas.

(2) Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya perusahaan pada periode tertentu. Selisih antara pendapatan dengan biaya menunjukkan laba atau rugi perusahaan pada periode tersebut.

(3) Laporan Arus Kas (*Cash Flow*)

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu yang diklasifikasikan ke dalam 3 aktivitas perusahaan, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

(4) Laporan Perubahan Modal (*Statement of Owner's Equity*)

Laporan perubahan modal merupakan ikhtisar perubahan modal perusahaan selama jangka waktu tertentu.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Catatan Atas Laporan Keuangan (*Notes to Financial Statement*)

Catatan atas laporan keuangan menunjukkan penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan akun laoran keuangan dan informasi penting lainnya.

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap akun dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan modal harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.

Dari jenis-jenis laporan keuangan di atas, yang berkaitan dengan konsep *prudence* adalah laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi memuat informasi mengenai besarnya laba perusahaan. Dengan menggunakan metode akuntansi tertentu, maka laba perusahaan yang dihasilkan akan berbeda.

d. Pelaporan Keuangan dan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan dan laporan keuangan dapat dibedakan berdasarkan pengertian. Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek tersebut berupa lembaga yang terlibat dan peraturan yang berlaku.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* No. 8 pelaporan keuangan bertujuan untuk:

- (1) Menyediakan informasi keuangan bagi pihak investor, kreditor tentang pelaporan entitas yang pada nantinya digunakan untuk mengambil keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada entitas pelapor.
- (2) Menilai prospek arus kas bersih yang dimiliki oleh suatu entitas oleh investor, kreditor untuk mengukur seberapa efektif dan efisien manajemen



entitas melakukan pengelolaan dan tanggungjawab komisaris untuk menggunakan sumber daya entitas.

- (3) Menyediakan informasi tentang posisi keuangan dari pelaporan suatu entitas yang pada nantinya informasi ini memberikan masukan manfaat untuk mengambil keputusan tentang penyediaan sumber daya entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan salah satu media dalam penyampaian informasi. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

3. Teori Akuntansi Positif

Teori Akuntansi Positif adalah teori yang berusaha menjelaskan dan memprediksikan fenomena tertentu (Hendrianto, 2012). Teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan teori keagenan yang menjelaskan dan memprediksi perilaku manajemen sehubungan dengan pemilihan prosedur akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu.

Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*) mengandung tiga hipotesis yang dapat menjelaskan keputusan manajemen untuk bertindak konservatif atau tidak. Hipotesis tersebut antara lain *plan bonus hypothesis*, *debt covenant hypothesis* dan *political cost hypothesis*.

Berdasarkan *plan bonus hypothesis*, perilaku manajer kerap kali bergantung pada bonus yang diberikan. Oleh karena itu manajemen cenderung melakukan manajemen laba agar target laba terpenuhi, tindakan ini membuat pelaporan laba menjadi tidak konservatif (Ardina dan Januari, 2012).



Debt covenant hypothesis memprediksikan bahwa manajer ingin meningkatkan laba dan aset untuk mengurangi biaya renegosiasi kontrak hutang ketika perusahaan memutuskan perjanjian hutangnya (Septian dan Anna, 2012).

Dalam *political cost hypothesis*, perusahaan besar diprediksikan lebih sensitif terhadap adanya biaya politik daripada perusahaan kecil (Watts dan Zimmerman, 1990). Biaya politik timbul karena adanya konflik kepentingan antara manajer dengan pemerintah, dimana perusahaan dianggap ikut bertanggung jawab atas kepentingan sosial.

4. Teori Agensi

Definisi teori agensi menurut William R. Scott (2015:358):

“Agency teori is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interests would otherwise conflict with those of the principal.”

Teori agensi dapat disebut juga sebagai teori kontraktual. Disebut demikian karena teori agensi meliputi adanya kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal yang dimaksud adalah pemegang saham yang memiliki kepemilikan di dalam sebuah perusahaan dan memberikan perintah kepada agen untuk menjalankan perusahaan. Sedangkan agen merupakan manajer perusahaan yang melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan. Agen wajib melakukan tugas yang diberikan prinsipalnya sebagai bentuk tanggung jawab jasanya.

Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada hasil yang diperoleh dari investasi mereka pada perusahaan. Sedangkan agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan yang mereka dapatkan, tetapi juga dari tambahan lain yang terlibat dalam hubungan keagenan. Kedua pihak tersebut menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan berusaha menghindari risiko yang mungkin terjadi.



Kedua pihak tersebut dapat menimbulkan konflik karena memiliki perbedaan kepentingan. Hal ini terjadi karena manajer akan cenderung mengambil keputusan dan kebijakan yang dapat memberikan keuntungan pada dirinya sendiri sebelum memberi manfaat kepada pemegang saham. Padahal hal itu tidak sesuai dengan tujuan utama manajer yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham yang diwujudkan melalui peningkatan harga saham biasa.

Contohnya, manajer dapat menaikkan laba sehingga perusahaan menjadi kurang konservatif sehubungan dengan kepentingan pribadi atau kreditur. Manajer juga dapat menurunkan laba sehingga perusahaan menjadi lebih konservatif jika berhubungan dengan pemerintah.

Agen lebih banyak memiliki informasi dibandingkan dengan prinsipal, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi dengan pihak pemegang saham sebagai pengguna informasi. Menurut Scott (2015:22) terdapat 2 macam asimetri informasi, yaitu:

- a. *Adverse Selection*
- b. *Moral Hazard*

Adverse selection merupakan jenis asimetri dimana manajer serta pihak dalam lainnya memiliki lebih banyak informasi mengenai keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan investor (pihak luar). Manajer serta pihak dalam lainnya memiliki kemungkinan untuk tidak menyampaikan informasi yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan kepada pemegang saham.

“Advedrse selection is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties.” (Scott, 2015:22)

Sedangkan *moral hazard* merupakan jenis asimetri informasi dimana kegiatan yang dilakukan oleh manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



maupun kreditur sehingga manajer dapat melakukan tindakan yang melanggar kontrak dan secara etika tidak layak untuk dilakukan diluar sepengetahuan pemegang saham.

“Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a contract can observe their actions in fulfillment of the contract but other parties cannot.”(Scott, 2015:22)

B. Faktor-Faktor yang Berpotensi Mempengaruhi Prinsip *Prudence*

1. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor internal perusahaan yang menentukan kemajuan perusahaan. Pemegang saham merupakan penyedia dana yang dibutuhkan perusahaan, tanpa pemegang saham perusahaan tidak dapat memiliki dana untuk membangun, memperluas dan mengoperasikan usaha bisnisnya.

Struktur kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan publik. Struktur kepemilikan publik merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh publik dibandingkan dari seluruh saham yang beredar (Deviyanti, 2012). Pengendalian akan cenderung rendah apabila kepemilikan publik menyebar. Hal ini dikarenakan banyaknya pemegang saham perusahaan dengan masing-masing pemilik hanya memiliki jumlah saham yang sedikit. Perusahaan akan dapat melakukan manajemen laba dengan menaikkan labanya agar mendapat bonus karena kinerjanya dinilai bagus (Sari et al. 2014).

Publik cenderung menginginkan laba yang besar dari perusahaan agar mendapatkan dividen atau keuntungan yang besar pula. Publik hanya mementingkan kepentingan jangka pendek untuk segera mendapatkan *return*, dengan demikian perusahaan akan memilih melaporkan laba yang tidak konservatif apabila struktur kepemilikan publiknya tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



2. Debt Covenant

Debt covenant merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan atau membiarkan modal dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan.

Kontrak ini didasarkan pada teori akuntansi positif, yaitu hipotesis *debt covenant* yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kontrak hutang lebih memungkinkan untuk menggunakan prosedur akuntansi yang meningkatkan nilai aset atau pendapatan. Perusahaan dengan rasio hutang yang lebih besar, memungkinkan manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba dari periode mendatang ke periode berjalan (Rohim, 2014).

Debt covenant dalam penelitian ini diproksi menggunakan *leverage*. Menurut Gitman dan Zutter (2015:124) *financial leverage* adalah perbesaran risiko dan pengembalian melalui penggunaan biaya tetap finansial, seperti hutang dan saham preferen. Semakin besar suatu perusahaan menggunakan hutang biaya tetap, semakin besar pula risiko dan pengembalian yang diharapkan.

Leverage menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang dan merupakan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Jika perusahaan telah diberi pinjaman oleh kreditor, maka kreditor secara otomatis mempunyai kepentingan terhadap keamanan dana yang ia pinjamkan, yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan.

3. Growth Opportunities

Pertumbuhan pada umumnya menunjukkan peningkatan ukuran skala perusahaan. Ukuran pertumbuhan perusahaan tergantung dari kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Growth opportunities adalah kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Perusahaan dengan *growth opportunities* yang tinggi memerlukan dana yang besar untuk membiayai pertumbuhan. Oleh karena itu, perusahaan akan selalu mempertahankan *earning* untuk diinvestasikan kembali pada perusahaan dan mengandalkan pendanaan melalui hutang yang lebih besar (Baskin dalam Astarini, 2013).

Pertumbuhan tersebut dapat dinilai responsif oleh investor sehingga nilai pasar pada perusahaan konservatif lebih besar daripada nilai bukunya sehingga menciptakan *goodwill*. Pasar akan menilai positif atas investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan karena dari investasi yang dilakukan saat ini diharapkan perusahaan akan mendapatkan kenaikan arus kas di masa depan (Rohim, 2014).

Untuk mengidentifikasi *growth opportunities* adalah dengan menggunakan pertumbuhan penjualan. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai *growth opportunities* yang baik akan mempunyai pertumbuhan penjualan yang lebih besar daripada perusahaan yang tidak mempunyai *growth opportunities*.

4. Biaya Politik

Biaya politik timbul karena adanya konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah selaku perwakilan masyarakat yang berwenang untuk melakukan pengalihan kekayaan yang didasarkan pada informasi akuntansi (laba) dari perusahaan ke masyarakat (Hasnawati dan Astuti, 2007).

Semakin besar laba suatu perusahaan, maka biaya politik yang harus dikeluarkan semakin besar pula. Karena itu manajer akan cenderung mengecilkan laba agar biaya politik berkurang. Proksi untuk biaya politik adalah ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar pula biaya politiknya (Oktomegah, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *prudence* tidak banyak dilakukan sebelumnya karena sebelumnya lebih dikenal prinsip konservatisme. Berikut beberapa penelitian mengenai konservatisme yang mengacu kepada *prudence* yang dijabarkan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Nur Ramawati (2015)	<u>Variabel Independen</u> Debt Covenant, Bonus Plan, Political Cost <u>Variabel Dependen</u> Prudence	Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda	- Debt covenant dan bonus plan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>prudence</i> - Political cost berpengaruh secara signifikan terhadap <i>prudence</i>
2	Agus Abdur Rohim (2014)	<u>Variabel Independen</u> Struktur Kepemilikan Manajerial, Debt Covenant, Growth, Risiko Litigasi <u>Variabel Dependen</u> Konservatisme	Regresi Linear Berganda	- Struktur kepemilikan manajerial dan debt covenant tidak berpengaruh terhadap konservatisme - Growth dan risiko litigasi berpengaruh terhadap konservatisme
3	Fatmariyani (2013)	<u>Variabel Independen</u> Struktur Kepemilikan Manajerial, Debt Covenant, Growth Opportunities <u>Variabel Dependen</u> Konservatisme	Asumsi Klasik	- Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap konservatisme - Debt covenant tidak berpengaruh negatif terhadap konservatisme - Growth opportunities berpengaruh positif terhadap konservatisme
4	Ardo Septian dan Yane Devi Anna (2013)	<u>Variabel Independen</u> Kepemilikan Manajerial, Ukuran	Asumsi Klasik	- Kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		Perusahaan, Debt Covenant, Growth Opportunities <u>Variabel Dependen</u> Konservatisme		berpengaruh signifikan terhadap konservatisme - Debt covenant dan growth opportunities secara signifikan tidak berpengaruh terhadap konservatisme
	5	Calvin Oktomegah (2012)	<u>Variabel Independen</u> Debt Covenant, Bonus Plan, Political Cost <u>Variabel Dependen</u> Konservatisme	Asumsi Klasik - Debt Covenant berpengaruh negatif secara signifikan terhadap konservatisme - Bonus Plan berpengaruh tidak secara signifikan negatif terhadap konservatisme - Political Cost berpengaruh positif secara signifikan terhadap konservatisme
	6	Dwi Astarini (2011)	<u>Variabel Independen</u> Struktur Kepemilikan, Debt Covenant, Growth Opportunities <u>Variabel Dependen</u> Konservatisme	Regresi Logistik - Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap konservatisme - Debt covenant dan growth opportunities tidak berpengaruh terhadap konservatisme
		Hasnawati dan Christina Dwi Astuti (2007)	<u>Variabel Independen</u> Struktur Kepemilikan, Debt Covenant, Political Cost, Growth, Manajemen Laba <u>Variabel Dependen</u> Konservatisme	Asumsi Klasik - Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap konservatisme - Debt covenant, political cost, growth dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap konservatisme

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap *Prudence*

Struktur kepemilikan merupakan faktor intern perusahaan yang menentukan kemajuan perusahaan dan sangat penting untuk mengukur nilai perusahaan. Dua aspek yang perlu dipertimbangkan adalah kepemilikan perusahaan oleh pihak luar dan kepemilikan perusahaan oleh manajer.

Ketika kepemilikan publik menyebar, pengendalian perusahaan akan cenderung rendah. Hal ini karena banyaknya pemilik saham perusahaan namun masih-masing hanya memiliki jumlah saham yang sedikit. Dengan kondisi ini, manajemen akan melakukan manajemen laba karena adanya fleksibilitas dalam menyajikan informasi laporan keuangan (Sari et al. 2014).

Sehingga ketika struktur kepemilikan publiknya tinggi, maka manajer cenderung melakukan manajemen laba dan tidak menerapkan prinsip *prudence* (Deviyanti, 2012).

2. Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap *Prudence*

Debt covenant merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan yang dilakukan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen yang berlebihan atau membiarkan ekuitas di bawah tingkat yang telah ditentukan. Ketika perusahaan memutuskan perjanjian hutang, manajer akan meningkatkan laba dan aset untuk mengurangi biaya kontrak hutang, dengan begitu manajer tidak akan menggunakan prinsip *prudence* (Rohim, 2014).

3. Pengaruh *Growth Opportunities* Terhadap *Prudence*

Growth opportunities adalah kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Perusahaan dengan *growth opportunities* yang tinggi memerlukan dana yang besar untuk membiayai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pertumbuhan. Oleh karena itu, perusahaan akan selalu mempertahankan *earning* untuk diinvestasikan kembali pada perusahaan dan mengandalkan pendanaan melalui hutang yang lebih besar (Baskin dalam Astarini, 2013).

Dalam hal ini manajer memiliki tantangan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan penggunaan uang kas. Semakin tinggi kesempatan tumbuh perusahaan maka semakin besar dana yang diperlukan. Besarnya dana yang diperlukan menyebabkan manajer menerapkan prinsip *prudence* agar pembiayaan untuk investasi dapat terpenuhi, yaitu dengan meminimalkan biaya (Septian dan Anna, 2013).

4. Pengaruh Biaya Politik Terhadap *Prudence*

Biaya politik timbul karena adanya konflik antara perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan yang memiliki laba yang besar akan mendapat tuntutan dari pemerintah untuk mengalihkan kekayaan perusahaannya kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tanggung jawab sosial (Hasnawati dan Astuti, 2007).

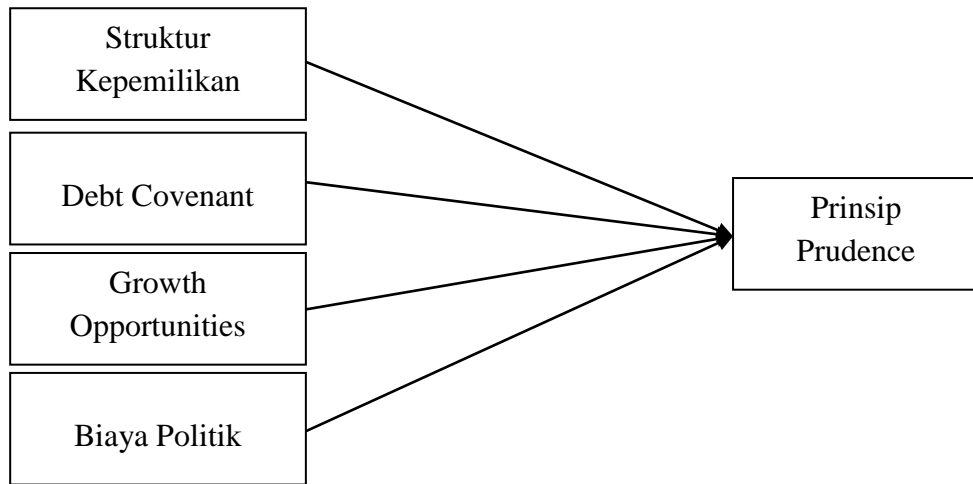
Perusahaan akan melaporkan laba yang rendah sehingga terhindar dari tuntutan pemerintah untuk memberikan pelayanan masyarakat serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Selain itu, laba yang rendah juga akan menghasilkan beban pajak yang rendah pula. Untuk itu manajemen akan menerapkan prinsip *prudence* bila perusahaannya memiliki laba yang besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan pengaruh struktur kepemilikan, *debt covenant*, *growth opportunities* dan biaya politik terhadap penerapan prinsip *prudence* pada kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- H₁ Struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap penerapan prinsip *prudence* dalam akuntansi.
- H₂ *Debt covenant* berpengaruh negatif terhadap penerapan prinsip *prudence* dalam akuntansi.
- H₃ *Growth opportunities* berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip *prudence* dalam akuntansi.
- H₄ Biaya politik berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip *prudence* dalam akuntansi.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.